

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses untuk melakukan suatu perubahan pada indikator sosial maupun ekonomi menuju ke arah yang lebih baik dan berkesinambungan. Keberhasilan pembangunan diukur dari berbagai hal, salah satunya yaitu dengan mengukur ketersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Manusia merupakan potensi dan kekayaan yang dimiliki dari suatu negara, oleh karena itu manusia harus selalu menjadi target pembangunan dari suatu negara. Karena sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadikan potensi bagi pembangunan suatu negara, namun sebaliknya jika sumber daya manusia di suatu negara kurang berkualitas maka hanya akan menjadi beban bagi pembangunan di suatu negara tersebut (Todaro, 2006).

Sumber daya manusia memiliki peran penting dari terciptanya sebuah pembangunan, yaitu pembangunan yang bertujuan menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat dan dapat menjalankan kehidupan yang produktif dan berkesinambungan. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, sumber daya manusia harus dapat berkembang dan mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya, pembangunan memiliki berbagai kompleksitas masalah. Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, baik aspek ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. (Maharany, 2012).

Pembangunan dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara, karena kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari proses pembangunan. Kesejahteraan yang dimaksudkan antara lain: masyarakat dapat menikmati umur panjang, sehat, mendapatkan pendidikan yang baik dan memiliki kemampuan produksi yang optimal. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari proses pembangunan, bukan merupakan alat dari proses pembangunan itu sendiri. Keberhasilan proses pembangunan manusia dapat terlihat dengan keberhasilan suatu negara mengatasi permasalahan-permasalahan mendasar di negaranya, misalnya masalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf dan gizi buruk (Kacaribu, 2013).

Dalam Islam memandang peningkatan SDM sangatlah penting dalam kemajuan suatu negara, Allah SWT memberikan akal yang merupakan alat untuk menuntut ilmu dan ilmu merupakan alat untuk mempertahankan diri dari segala kesulitan. Maka pendidikan merupakan hal penting dalam meningkatkan derajat atau taraf hidup agar terhindar dari segala kesulitan, sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya :*“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang*

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Mujadilah: 11)

Ayat di atas merupakan penjelasan bagaimana Allah sangat menekankan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan derajat atau taraf hidup manusia. Untuk memperoleh pendidikan diperlukan kondisi jasmani dan rohani yang sehat. Kesehatan masyarakat juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk. Kesehatan masyarakat akan berimplikasi pada produktivitas masyarakat, sehingga pembangunan dibidang kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Oleh karena itu kesehatan juga penting dalam peningkatan SDM yang akhirnya berdampak pada peningkatan kemajuan suatu wilayah.

Menurut BAPPENAS (Badan Perencana Pembangunan Nasional), indeks pembangunan manusia memiliki peran sebagai ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks pembangunan manusia dengan metode baru dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen, yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, serta besarnya pengeluaran masyarakat untuk mengkonsumsi sejumlah kebutuhan pokok yaitu pengeluaran per kapita sebagai pendekatan yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pembangunan untuk hidup yang layak. Dimulainya perhitungan indeks pembangunan manusia dengan metode baru yaitu pada tahun 2010 dan berlaku hingga sekarang.

Indeks pembangunan manusia Republik Indonesia pada tahun 2015 menduduki peringkat 113 dari 188 negara di dunia. Indeks pembangunan manusia memiliki peningkatan sekitar 30.5 persen dalam 25 tahun terakhir. Namun, dinilai tidak diimbangi dengan meningkatnya sejumlah indikator, sehingga justru bertolak belakang. Seperti tingkat kemiskinan dan kelaparan di Indonesia yang mencapai 140 juta orang dengan biaya hidup kurang dari Rp. 20.000,00 per hari, ditambah dengan gizi buruk yang diderita sekitar 19,4 juta orang. Tingkat kesehatan dan kematian juga masih sangat memprihatinkan, sebanyak 2 juta anak usia di bawah satu tahun belum menerima imunisasi lengkap. Sedangkan tingginya angka kematian ibu sebanyak 305 kematian per 100 ribu kelahiran hidup juga sangat memprihatinkan. Untuk akses ke layanan dasar, masih sangat kurang sehingga banyak anak tidak bersekolah (Fauzi, 2017).

Berdasarkan masalah-masalah tersebut, berikut beberapa langkah dapat diambil menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) Indonesia, sebuah lembaga yang berwenang untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bahwa untuk mempersempit kesenjangan yang ada, yaitu: 1.) Kebijakan umum dapat digunakan oleh semua pihak termasuk mereka yang tertinggal. 2) Dapat menyediakan sarana pra sarana untuk kelompok dengan kebutuhan khusus. 3) Memastikan adanya ketahanan dalam pembangunan manusia dengan cara penyesuaian program dengan kebutuhan masyarakat lokal, menyediakan lapangan pekerjaan, serta memberi perlindungan sosial dengan strategi penciptaan

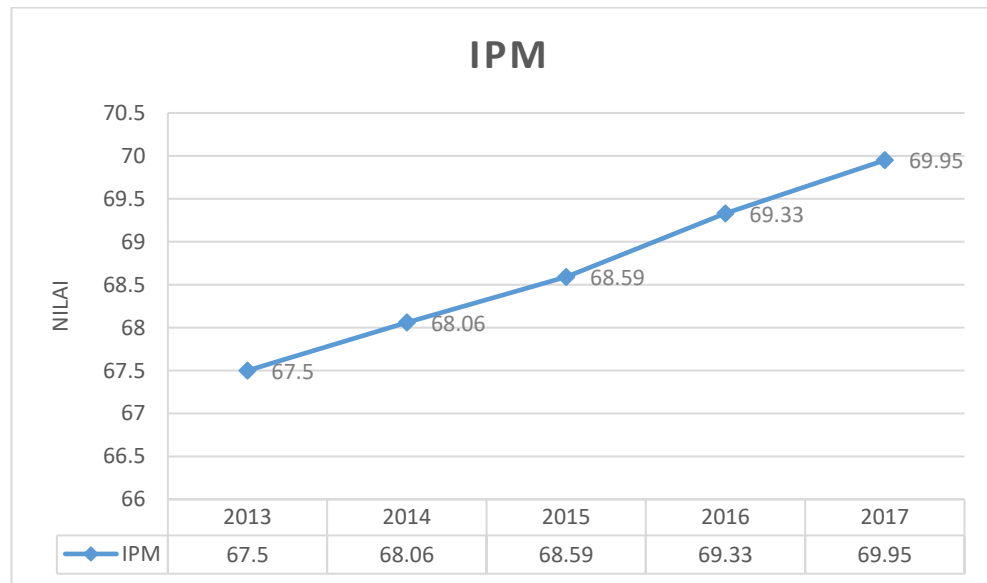
lapangan kerja yang tepat. 4) Memberdayakan masyarakat tak terkecuali mereka yang tertinggal dengan tetap memberikan hak asasi manusia sesuai dengan Undang Undang yang berlaku (Fauzi, 2017).

Tabel 1.1
Peringkat Indeks Pembangunan Manusia Pulau Sumatra
Tahun 2013-2017

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia				
	2013	2014	2015	2016	2017
Aceh	68.30	68.81	69.45	70.00	70.60
Sumatera Utara	68.36	68.87	69.51	70.00	70.57
Sumatera Barat	68.91	69.36	69.98	70.73	71.24
Riau	69.91	70.33	70.84	71.20	71.79
Jambi	67.76	68.24	68.89	69.62	69.99
Sumatera Selatan	66.16	66.75	67.46	68.24	68.86
Bengkulu	67.50	68.06	68.59	69.33	69.95
Lampung	65.73	66.42	66.95	67.65	68.25
Kep. Bangka Belitung	67.92	68.27	69.05	69.55	69.99
Kep. Riau	73.02	73.40	73.75	73.99	74.45

Sumber : Badan Pusat Statistik, IPM Provinsi 2017

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa keseluruhan IPM provinsi mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Namun IPM tertinggi pada tahun 2017 ialah Provinsi Kep. Riau dengan 74.45 poin sedangkan untuk IPM terendah yaitu Provinsi Lampung 68.25 poin. Untuk Provinsi Bengkulu sendiri menduduki peringkat ketiga terendah setelah Provinsi Jambi yaitu 69.95 poin. Hal tersebut menyatakan bahwa pembangunan manusia di Provinsi Bengkulu masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain terutama di Pulau Sumatera, yang hanya menduduki peringkat ke 8 dari semua Provinsi di Pulau Sumatera.



Sumber : Badan Pusat Statistik, IPM Provinsi Bengkulu 2017

Gambar 1.1
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu
Tahun 2013-2017

Dari gambar 1.1 di atas, terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu dari tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bengkulu pada tahun 2013 yaitu 67,50 poin, pada tahun 2014 yaitu 68,06 poin, pada tahun 2015 yaitu 68,58 poin, pada tahun 2016 yaitu 69,33 poin, dan pada tahun 2017 yaitu 69,95.

Dengan melihat angka IPM Provinsi Bengkulu, maka peran yang diemban pemerintah semakin penting karena pemerintah dituntut harus mampu melakukan fungsi alokasi untuk seluruh sumber daya yang dimiliki daerah di berbagai sektor untuk dapat meningkatkan seluruh pelayanan publik sehingga tercapai kesejahteraan sosial masyarakat.

Tabel 1.2
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu
Tahun 2013-2017

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia				
	2013	2014	2015	2016	2017
Provinsi Bengkulu	67.50	68.06	68.59	69.33	69.95
Bengkulu Selatan	67.61	68.28	68.57	68.71	69.04
Rejang Lebong	66.11	66.55	67.51	68.34	68.61
Bengkulu Utara	66.67	67.27	67.46	67.63	67.80
Kaur	63.17	63.75	64.47	64.95	65.28
Seluma	62.10	62.94	63.41	64.04	65.00
Mukomuko	64.79	65.31	65.77	66.52	67.07
Lebong	63.15	63.90	64.72	65.58	65.87
Kepahiang	64.44	65.22	65.45	66.35	66.60
Bengkulu Tengah	63.71	64.10	64.68	65.44	65.80
Kota Bengkulu	76.16	76.49	77.16	77.94	78.82

Sumber : Badan Pusat Statistik, IPM Provinsi Bengkulu 2017

Peringkat IPM kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu bervariasi, kota Bengkulu menempati posisi teratas pada tahun 2017 dan termasuk dalam kategori tinggi yaitu sebesar 78,82 poin, itu lebih besar dibanding IPM Nasional dan IPM Provinsi Bengkulu di tahun yang sama. Sedangkan IPM terendah di Provinsi Bengkulu adalah Kabupaten Seluma dengan nilai IPM 65,00 poin terlihat perbedaan yang sangat jauh dibandingkan dengan Kota Bengkulu.

Dengan melihat kenyataan angka Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota maka peran dan tanggung jawab yang di emban pemerintah daerah menjadi semakin penting karna dituntut untuk melakukan fungsi alokasi atas pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, serta fasilitas umum agar tercapai kesejahteraan sosial masyarakat yang menyangkut konsep pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu hal yang penting untuk mengukur tingkat kualitas SDM dalam negeri. Salah satu bagian yang menjadi tolak ukur IPM yakni Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan. Pengeluaran pemerintah di bidang sektor kesehatan merupakan layanan jasa yang normatifnya disediakan oleh pemerintah, bukan oleh swasta apalagi oleh pasar. Dalam hal peningkatan pembangunan manusia di sektor kesehatan yang baik bagi setiap masyarakat akan terwujud dengan adanya alokasi pengeluaran pemerintah di sektor tersebut. Sehingga, nantinya akan meningkatkan produktivitas masyarakat yang bisa meningkatkan pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah tersebut disebut sebagai investasi publik. (Astri dkk, 2013). Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Basuki dan Saptutyningasih pada tahun 2016 yang menyatakan variabel Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan berpengaruh positif.

Pembangunan sumber daya manusia juga harus didukung oleh faktor penunjang yang memumpuni, dalam hal ini ialah fasilitas umum. Fasilitas umum atau Infrastruktur sama dengan prasarana yaitu segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Infrastruktur merupakan salah satu indikator utama dalam melihat kemajuan suatu wilayah. Fasilitas umum di suatu daerah sangat penting untuk menunjang kegiatan masyarakat, sehingga masyarakat dapat dimudahkan dan dapat menambah ukuran pembangunan manusia lebih meningkat yang dilihat dari Indeks pembangunan Manusia. Infrastruktur itu sendiri, di bagi menjadi dua

bagian yaitu transportasi dan energi. Pada bagian transportasi, peningkatan infrastruktur dilihat dari peningkatan akses mobilitas masyarakat terkait kemudahan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sedangkan pada bagian energi infrastruktur berperan dalam memberikan tingkat kesejahteraan berupa pemerataan tingkat kelayakan hidup masyarakat. Hal ini dimaksud adanya pendistribusian energi berupa listrik serta pasokan air bersih. Berdasarkan penjelasan tersebut infrastruktur juga memiliki pengaruh dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini dikarenakan dengan adanya peningkatan infrastruktur dapat mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat. Sehingga, dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat berarti juga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia yang ada. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayat pada tahun 2018 yang menyatakan variabel Fasilitas Umum berpengaruh positif.

Di dalam Indeks Pembangunan Manusia, sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Peningkatan tersebut, berupa peningkatan dari segi kualitas dan kuantitas dari sektor pendidikan itu sendiri. Peningkatan tersebut harus diiringi dengan peningkatan anggaran pemerintah di sektor pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Anggaran Pemerintah di Sektor Pendidikan nantinya akan direalisasikan dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan yang bertema pendidikan, seperti pelatihan skill, seminar atau

workshop, ataupun kegiatan yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Selanjutnya, realisasi anggaran juga dapat di peruntukkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai serta penambahan alat penunjang di bidang pendidikan lainnya. Dengan demikian, anggaran pemerintah dapat terealisasi dengan baik pada proses peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) agar meningkatnya kuantitas dan bermutu tinggi. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Susanto pada tahun 2018 yang menyatakan variabel Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan berpengaruh positif.

Alasan peneliti memilih seluruh kabupaten/kota Provinsi Bengkulu sebagai objek penelitian, karena Indeks Pembangunan Manusia provinsi Bengkulu selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya, walaupun peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan atau relatif rendah jika dibandingkan dengan Provinsi lain di pulau Sumatera. Oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan serta menggambarkan kondisi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bengkulu agar dapat memberikan gambaran serta panutan terhadap provinsi-provinsi lain terutama di Pulau Sumatera terkait dalam tingkat Indeks Pembangunan Manusia agar terciptanya Pembangunan Manusia yang merata di Pulau Sumatera terutama di Provinsi Bengkulu. Peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia merupakan fenomena menarik karena Indeks Pembangunan Manusia dapat menggambarkan pencapaian kinerja dalam mengembangkan sumber daya manusia yang handal untuk membangun perekonomian di suatu wilayah.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul, **“ANALISIS FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 – 2017”**.

B. Batasan Masalah Penelitian

Sehubungan dengan faktor keterbatasan yang ada dan mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia, maka penelitian hanya berfokus pada :

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu 2013-2017.
2. Variabel independen yaitu Belanja pemerintah di Bidang Kesehatan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 2013-2017, Fasilitas Umum kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 2013-2017, dan Belanja pemerintah di Bidang Pendidikan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 2013-2017.
3. Variabel ini menggunakan data panel di sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 2013-2017.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan kabupaten/kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Bengkulu tahun 2013-2017 ?

2. Bagaimana pengaruh Fasilitas Umum kabupaten/kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Bengkulu tahun 2013-2017 ?
3. Bagaimana pengaruh Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan kabupaten/kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Bengkulu tahun 2013-2017 ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan kabupaten/kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bengkulu tahun 2013-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh Fasilitas Umum kabupaten/kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bengkulu tahun 2013-2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan kabupaten/kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bengkulu tahun 2013-2017.

E. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi Penulis
Dapat menambah ilmu serta wawasan tentang hal yang diteliti sehingga mampu membandingkan antara teori yang diterima selama perkuliahan dan realita di lapangan.
2. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini menjadi bahan masukan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai peranan Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan, fasilitas umum, dan belanja pemerintah di bidang pendidikan kabupaten/kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Bengkulu tahun 2013-2017.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi Indikator Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bengkulu.

4. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta sebagai bahan masukan dalam penentuan sebuah kebijakan Pemerintah Pusat terutama Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia ke depannya.